

KAJIAN DISTRIBUSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH TERHADAP PROGRAM KEBENCANAAN

Rahmat¹, Nizamuddin², Agussabti³

¹) Magister Ilmu Kebencanaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

²) Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

³) Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh 23111, Indonesia
Email Penulis: rahmat.thalib99@gmail.com¹, neazaem@yahoo.com, agus.sabti@tdmrc.org³

Abstract: Aceh is a province in Indonesia that faces high potential of disaster, both natural disasters and non-nature. The main thing that the government has to prepare is to reduce the impact of the disaster through mitigation. Disaster mitigation is a series of efforts to reduce disaster risk, either through physical actions, awareness and capacity building to disaster mitigation (article 1 paragraph 6 Government Regulation No 21 years 2008 on the implementation of the disaster). One form of the disaster mitigation is disaster programs that set up on the institutions of the Aceh Government (Satuan Kerja Pemerintah Aceh – SKPA) that are funded by Aceh Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh - APBA). The purpose of this research is to identify the programs on Disaster Mitigation through distribution of Aceh Government budget allocation to institutions under the Aceh Government. The methodology that uses on this research is qualitative-quantitative approach and also supported by interview with stakeholders on Aceh Government. The data are being described using graphics and pie charts. The result indicates that the highest distribution of the APBA on disaster mitigation to the SKPA in 2014 is to Aceh Disaster Mitigation Agency (Badan Penanggulangan Bencana Aceh-BPBA), which is 86.10% of total the BPBA budget, and to Aceh Irrigation Office (Dinas Pengairan Aceh), which is 56.15% of total the office budget. The lowest distribution of the APBA on disaster mitigation is allocated to Aceh Community Empowerment Board (Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh –BPM Aceh), which is 1.87% of its budget. For the disaster programs themselves, the programs have set up on 13 SKPAs under their job descriptions and authority (tupoksi).

Keywords : *Distribution, disaster program, APBA, mitigation*

Abstrak: Aceh memiliki ancaman risiko bencana yang sangat kompleks, baik bencana Alam maupun non alam. Hal utama yang harus dilakukan dalam meminimalisir dampak kerugian bencana yaitu dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Salah bentuk dari mitigasi bencana yaitu dengan adanya program kebencanaan pada instansi-instansi terkait yang mampu menanggulangi masalah kebencanaan. Untuk melihat distribusi program kebencanaan pada instansi dilihat dari Anggaran Pendapatan belanja Aceh (APBA). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengkaji program pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan bencana dan mengkaji distribusi APBA dalam upaya penanggulangan bencana di pemerintah Aceh. Adapun metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif-diskriptif dengan data-data yang di dapatkan kemudian di diskripsikan melalui grafik dan pie chart dan diperkuat dengan wawancara pihak pemerintah. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai persentase distribusi APBA terhadap program kebencanaan tertinggi yaitu pada tahun 2014 Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebanyak 86.10 % dan dinas pengairan sebanyak 56.15 %. Serta tingkat persentase terendah yaitu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1.87 % Secara umum Program kebencanaan sudah terdistribusi pada 13 instansi namun sesuai dengan tupoksi instansi.

Kata kunci : *Distribusi, program kebencanaan, APBA, mitigasi*

PENDAHULUAN

Aceh memiliki potensi besar terkait ancaman risiko bencana, Untuk itu perlu adanya mitigasi terhadap bencana. Tindakan mitigasi terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.

Mitigasi struktural adalah tindakan untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bencana secara fisik. Bentuk dari mitigasi yang di upayakan dari pemerintah yaitu dengan

kesiapan pemerintah dalam menghadapi Bencana, dengan tindakan awal untuk perencanaan kebencanaan terlihat dari adanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tentang (DIPA) kebencanaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK 02/2013 Petunjuk dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dari fakta-fakta kebencanaan yang sering terjadi di Aceh harusnya pemerintah lebih serius dalam mengupayakan perencanaan kebencanaan melalui APBA terhadap kebencanaan

TUJUAN PENELITIAN

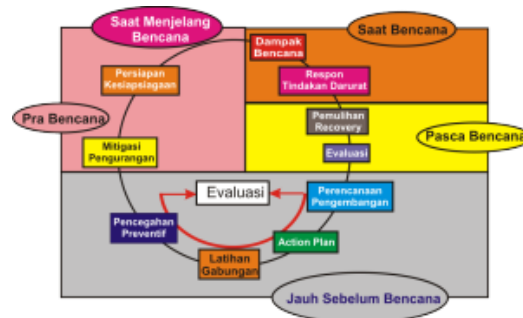
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji program pemerintah Aceh dalam upaya penanggulangan bencana
2. Mengkaji komposisi dari distribusi APBA dalam upaya penanggulangan bencana di pemerintah Aceh

TINJAUAN PUSTAKA

Mitigasi Bencana

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).



Gambar 1 : Siklus Bencana

Penanggulangan bencana alam bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bencana dan dampak yang ditimbulkan. Karena itu, dalam penanggulangannya harus memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana alam.

Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana bertujuan untuk (pasal 4 UU Republik Indonesia No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana) :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, berkoordinasi, dan menyeluruh
- d. Menghargai budaya lokal
- e. Membangun partisipasi dan kemnitraan publik serta swasta
- f. Mendorong semangat gotong-royong, ke setia kawan, dan kedermwanaan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sistem Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Secara umum anggaran diartikan sebagai

sebuah rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan mata uang dalam suatu periode tertentu. Keuangan Daerah selalu melekat dengan APBD, yaitu sebagaimana yang didefinisikan oleh Akbar (2002:3), APBD adalah suatu rencana kerja PEMDA yang ditetapkan berdasarkan peraturan dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. APBD merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah.



Gambar 2 : Alur penyusunan APBD

Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Dalam Pengurangan Risiko Bencana

Kebencanaan dan penganggaran menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Anggaran menjadi materi krusial dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Dalam konteks dana publik yang dikelola oleh Negara maka APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten / Kota adalah sumber dana yang perlu dikelola agar agenda-agenda terkait dengan PRB dapat diimplementasikan (Sunarja,2010). Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 2).

Tabel 1: Peraturan - Perundangan Tentang Mekanisme Penganggaran Terkait Dengan Pengurangan Risiko Bencana

ISU	ATURAN	ISI
Dana darurat APBN untuk Pemda	UU No.32/2004 pasal 164 (3)	Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD
	UU No.32/2004 pasal 165 (2)	Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait
	UU No.32/2004 pasal 165 (3)	Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
	UU No.32/2004 pasal 166 (1)	Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
	UU No.32/2004 pasal 166 (2)	Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bantuan pemerintah	UU No.32/2004 pasal 164 (3)	Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.
Dana siap pakai untuk BNPB	UU No.24/2007 pasal 62 (2)	Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
APBD	UU No.24/2007 pasal 8 (d)	Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai

Sumber : UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.24 Tahun 2007, diolah

Dari beberapa pos anggaran yang memungkinkan dikelola untuk kebencanaan, APBD merupakan suatu pos dana yang akan digunakan UNTUK penanganan kebencanaan. Dalam rangka itulah, menyusun APBD yang responsif PRB menjadi hal penting. APBD merupakan cermin komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif-kuantitatif. Proses ini berlangsung sebagai berikut: (1) mengumpulkan data-data terkait Anggaran Pendapatan Belanja Aceh pada tahun 2010-2014; (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkaji; (3) melakukan perhitungan dengan persentase dan trend tahun (4) melalui wawancara dengan pihak terkait untuk memperkuat data.

Lokasi penelitian ini adalah wilayah yang dijadikan sebagai wilayah amatan terkait APBA terhadap kebencanaan yaitu wilayah Aceh, seperti yang diketahui bahwa Aceh merupakan wilayah yang rentan akan kebencanaan.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi beberapa data yaitu :

Tabel 2 : Data Yang Di Butuhkan Dan Sumbernya

N O	DATA DAN INFORMASI	SUMBER DATA	TEKNIK DAN JENIS DATA	TAH UN
1	Kejadian Bencana di Aceh	BPBA	telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014
2	Anggaran yang dikeluarkan untuk Tanggap Darurat	BPBA	telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014
3	Rencana Penyusunan Jangka Panjang	BAPPED A	telaah dokumen	1995 - 2015
5	<ul style="list-style-type: none"> Program-program APBA Program-program RAPBA 	Badan Keuangan	telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014
6	<ul style="list-style-type: none"> Program kebencanaan APBA Program kebencanaan RAPBA 	Badan Keuangan dan BPBA	telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014
7	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran		telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014
8	Aceh Dalam Angka	BPS	telaah dokumen	2010 - 2015
9	Kerugian DALA Bencana	BPBA	telaah dokumen dan Wawancara	2010 - 2014

HASIL PEMBAHASAN

Identifikasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh pada Satuan Perangkat Kerja Aceh

Terdapat 54 Instansi / SKPA dalam pemerintahan Aceh telah didapatkan data yang di butuhkan sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan peneliti, dari 54 SKPA hanya dikaji pada SKPA yang memiliki keterkaitan dengan program kebencanaan.

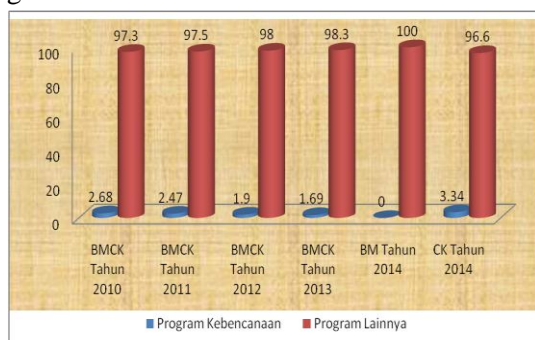
Data yang telah didapatkan berasal dari Bappeda Aceh secara keseluruhan data tersebut sudah menjelaskan dengan sangat rinci mengenai program-program yang sudah dilaksanakan oleh instansi Aceh. Untuk memperoleh hasil analisis dari penelitian ini, akan di ambil beberapa instansi saja, yang sangat tepat untuk melihat seberapa besar

distribusi program kebencanaan. Adapun instansi yang akan dijadikan objek penelitian ini yaitu :

1. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya
2. Badan Penanggulangan Bencana Aceh
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Sosial
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika
8. Dinas Kelautan dan perikanan
9. Dinas pemuda dan Olahraga
10. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
11. Dinas Pengairan
12. Biro keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
13. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh

Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh terhadap Program Kebencanaan

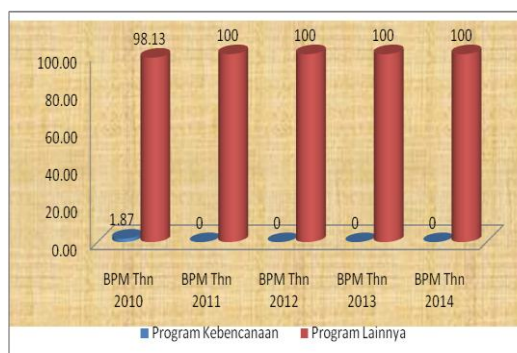
Analisis ini akan memberikan gambaran tentang pengelolaan APBA pada masing-masing Instansi, hasil analisis ini mampu memberikan gambaran persentase distribusi program kebencanaan yang telah diupayakan oleh pemerintah Aceh. dapat dilihat pada gambar 3-15.



Gambar 3 : grafik program kebencanaan pada BMCK 2010-2014



Gambar 4 : grafik program kebencanaan pada BPBA 2010-2014



Gambar 5 : grafik program kebencanaan pada BPM 2010-2014



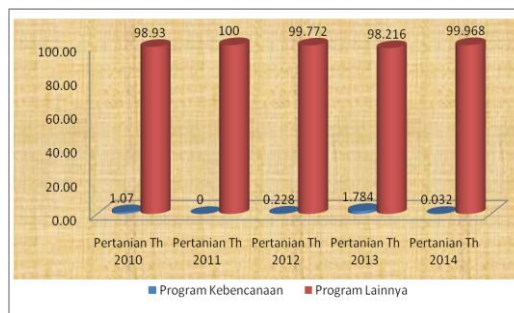
Gambar 6 : grafik program kebencanaan pada Dinas Kesehatan 2010-2014



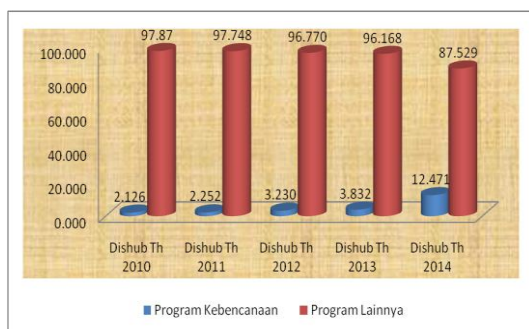
Gambar 7: grafik program kebencanaan pada Dinas Sosial 2010-2014



Gambar 8 : grafik program kebencanaan pada Dinas Pendidikan 2010-2014



Gambar 12 : grafik program kebencanaan pada Dinas pertanian 2010-2014



Gambar 9 : grafik program kebencanaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika 2010-2014



Gambar 13 : grafik program kebencanaan pada Dinas Penguian 2010-2014



Gambar 10 : grafik program kebencanaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan 2010-2014



Gambar 14: grafik program kebencanaan pada Biro Keisra 2010-2014



Gambar 11 : grafik program kebencanaan pada Dinas Pemuda dan Olah raga 2010-2014



Gambar 15 : grafik program kebencanaan pada

Dinas Perkebunan dan Kehutanan 2010-2014
Dari analisis diatas terlihat bahwa distribusi APBA untuk program kebencanaan yang paling tinggi yaitu pada instansi BPBA dan Pengairan yaitu sebanyak 86.1 % dan 56.1 % sedangkan yang paling rendah terdapat pada instnasi BPM dan Dispora yaitu 0 %

Analisis Distribusi Pengelolaan Anggaran Belanja Pendapatan Aceh terhadap Program Kebencanaan

Proses Analisis pengelolaan APBA terhadap program kebencanaan yang terdiri dari 13 instansi tersebut memiliki banyak program-program untuk kebencanaan berupa perencanaan, pengawasan, pengadaan peralatan dan kontruksi, program tersebut sangat berpengaruh dalam proses penanggulangan bencana di Aceh.

Tabel 3 : Distribusi APBA 13 Instansi Terhadap program kebencanaan

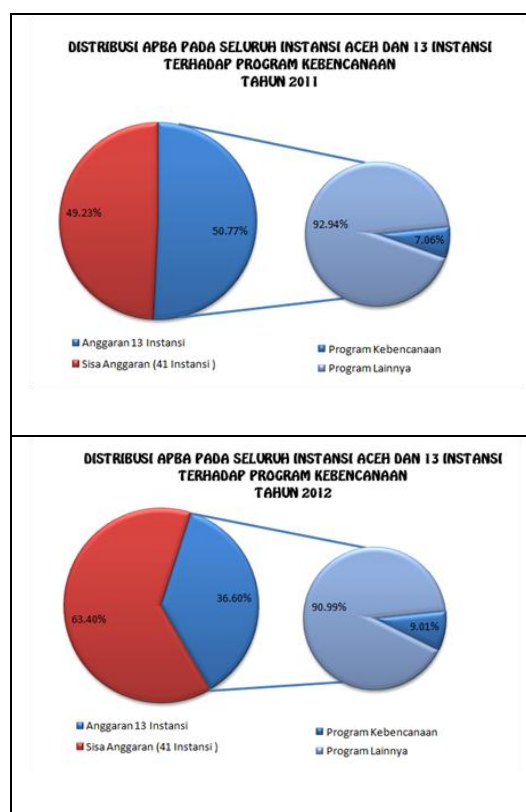
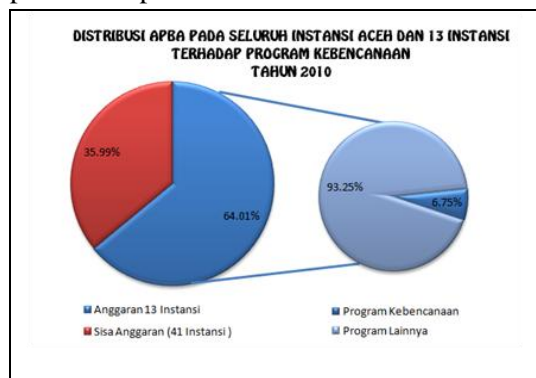
TAHUN	JUMLAH PROGRAM KEBENCANAAN 13 INSTANSI (RP.)	PERSEN (%)	JMLH PROGRAM LAINNYA 13 INSTANSI (RP.)	PERSEN (%)	JUMLAH APBA 13 INSTANSI(RP)
2010	300,146,254,500	6.75	4,149,260,008,272	93.25	4,444,255,674,830
2011	283,355,554,087	7.06	3,734,381,645,103	92.94	4,014,387,478,190
2012	418,100,197,866	9.01	4,225,686,142,253	90.99	4,641,302,851,463
2013	248,336,826,827	4.22	5,620,100,413,746	95.78	5,887,085,513,403
2014	591,133,109,590	9.50	5,632,801,427,140	90.5	6,219,326,268,691

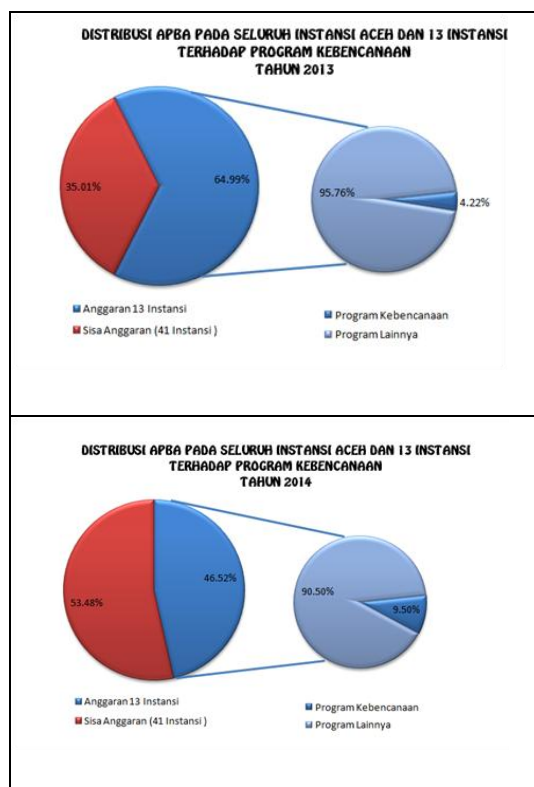
Sumber : Data Sekunder (diolah, 2015)

Tabel di atas merupakan hasil kompilasi data-data APBA yang telah dirangkum dari 13 instansi selama 5 tahun terakhir mengenai program-program kebencana yang telah dilaksanakan.

Tidak semua instansi yang telah di analisis berupaya dalam pendistribusian Anggaran untuk program bencana, seperti pada dinas pendidikan dan dinas pemuda dan olahraga. Distribusi terbesar yang diberikan instansi Badan Penanggulangan Bencana Aceh dan Dinas Pengairan.

untuk mengetahui distribusi APBA total dan APBA 13 Instansi terhadap program kebencanaan dapat di implementasikan pada persentase pie chart berikut.





Dari pie chart di atas terlihat distribusi Anggaran 13 Instansi yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan program kebencanaan dan Sisa Anggaran pada setiap tahunnya terbagi hampir sama (konstan) yaitu pada tahun 2010 sebesar 64.99% atau Rp4,444,255,674,830 diperuntukan untuk 13 instansi, dari Anggaran 13 instansi ini kemudian dikaji distribusi Anggaran program kebencanaannya yang didapatkan sebanyak 6.36% atau Rp.294,495,666,558 dan Sisa program lain pada 13 instansi sebesar 93.36% atau sebesar Rp.4,149,260,008,272.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program kebencanaan pada Pemerintah Daerah Aceh dalam upaya penanggulangan bencana telah terdistribusi di 13 Instansi namun jumlah alokasi anggarannya

berbeda-beda sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi.

2. Tingkat distribusi APBA yang paling tinggi terhadap program kebencanaan terdapat pada instansi BPBA dan Dinas Pengairan dengan jumlah tahun terakhir yaitu sebanyak 86.10% dari total jumlah Anggaran untuk BPBA pada tahun tersebut Rp.57,581,177,455 dan 56.15 % dari total jumlah anggaran untuk dinas pengairan pada tahun tersebut Rp.589,077,502,685. Sedangkan tingkat distribusi terendah yaitu pada instansi Dinas Pendidikan, program kebencanaan hanya ada pada tahun 2010 dengan persentase sebesar 0.64% dari Rp.884,473,579,381
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdapat 1 instansi yang tidak memiliki program kebencanaan yaitu dinas pemuda dan olah raga dengan nilai distribusinya sebanyak 0%

Saran

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan motivasi untuk masa yang akan datang terkait program kebencanaan, adapun saran tersebut yaitu :

1. Perlu memasukkan program kebencanaan pada setiap level Musrembang, baik Musrembang tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun provinsi, sehingga setiap Instansi memiliki alokasi anggaran khusus untuk penanggulangan bencana, minimal sebanyak 1% dari jumlah total Anggaran pada masing-masing instansi sehingga alokasi anggaran untuk program kebencanaan terdistribusi secara merata.
2. Pada setiap instansi jika memuat tentang program kebencanaan, harus ada pemberian judul yang tegas mengarah pada program kebencanaan
3. Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh juga mengatur tentang program kebencanaan, mengingat Aceh memiliki ancaman bencana yang lumayan banyak..

DAFTAR PUSTAKA

- AR, Mustopadidjaya, Sistem dan Proses Penyusunan APBDN, Modul pada Program Diklat TMPP-D Angkatan XV, Ujung Pandang, 1997
- Baswir Revrison, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi ketiga, BPFE Yogyakarta, 1997.
- Jhon Andra Asmara.2010. Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBA) Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2 Juli 2010 Hal. 155-172*
- Jurnal Kebijakan Publik “ Berbagai Kebijakan Pemerintah Dalam Perekonomian Indonesia ”Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta: vol
- Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, Edis ketiga UI- Press, Jakarta, 1996.
- Mamesah, D.J, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK 02/2013 Petunjuk dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- Peraturan Menteri PU Nomor 19 Tahun 2006 dan criteria kesepakatan antara BNPB dan Dep. PU
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- Pribadi, Krisna S. (2008). Penyusunan Masterplan (Rencana Induk) Penanggulangan Bencana Di Propinsi Jawa Barat. Makalah. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana ITB 11 Agustus 2008
- Robert Kodoatie Ph. D., dan Roestam Syarief Ph.D, *Pengelolaan Bencana Terpadu*, 2005
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Penerbit : ALFABETA: Jakarta.*
- Sunarja, 2010. Meredam Risiko Bencana : Upaya Integrasi PRB Dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Penerbit: DEA (*Institute for Development and Economics Analysis*): Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana